

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP
TATA KELOLA PEMERINTAH PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Oleh

Rizki Rediq Rahardian

Email : Rizkirediqrahardian@yahoo.co.id

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Slamet Riyadi SKA
Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu kegiatan pemerintahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, sampel dalam penelitian ini adalah staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta sebanyak 14 orang. Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Uji coba yang digunakan untuk instrument ini adalah uji coba validitas dan realibilitas. Teknik analisis data menggunakan rumus Regresi Linier Sederhana, Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi.

Hasil Regresi Linier Sederhana diperoleh persamaan $Y=19,454 + 0,754X$, hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Tata Kelola Pemerintah. Hasil Uji t variable Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperoleh t hitung = 3,263 ρ - value $0,007 < 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X) berpengaruh terhadap Tata Kelola Pemerintah (Y). Hasil Uji F nilai F table = 10,644 dengan ρ - value sebesar $0,007 < 0,05$, maka H_0 diterima, berarti ada pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Tata Kelola Pemerintah.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

Pendahuluan

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan serta pertanggungjawaban seluruh kegiatan pemerintah, pemerintah membuat suatu sistem yang berguna untuk mengawasi kegiatan pemerintah, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem ini diberlakukan kepada semua instansi pemerintah dan diberikan wewenang kepada setiap pimpinan instansi untuk memberlakukan sistem ini dan mengawasinya. Di dalam instansi pemerintahan sebuah organisasi sangatlah penting. Setiap organisasi yang dibentuk di instansi pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Organisasi di dalam instansi pemerintahan dapat dikatakan dapat berjalan dengan baik jika Sumber Daya Manusia sebagai penggerak jalannya pemerintahan dikelola dengan baik. Salah satu tujuan pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Kunci utama dalam memahami tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Dalam

upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satunya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu kegiatan pemerintahan, maka tanggal 28 Agustus 2008 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan

secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta membentuk Bagian Organisasi dengan tujuan untuk membantu jalannya penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada Bagian Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Bagian Organisasi memiliki peranan penting dalam penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah seluruh SKPD di Pemerintah Kota Surakarta. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta dibuat setiap akhir tahun sekali guna mengetahui bagaimana perkembangan kinerja Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta beserta dengan staf pegawai negeri sipil di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

Tabel I Jumlah Masalah Pengendalian Intern pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2018

Tahun	Jumlah ASN	Masalah Pengendalian Intern
2016	14	27
2017	14	10
2018	15	5

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa beberapa tahun SPIP pada Bagian Organisasi mengalami permasalahan yang tahun demi tahun mengalami penurunan. Sebagian besar permasalahan yang terjadi antara tahun 2016 hingga 2018 mengalami masalah yang berkaitan dengan pegawai yaitu pengelolaan SDM yang kurang oleh pemerintah serta kurangnya integritas dan nilai

etika pegawai pada aturan. Pada tahun 2018 masalah yang dihadapi meliputi, pegawai belum memperoleh penghargaan yang sepadan sesuai prestasi kerjanya, instansi belum memiliki kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan SDM, belum semua pegawai negeri sipil di bagian organisasi patuh atas aturan yang berlaku, belum memiliki system penilaian kinerja dan system penghargaan (reward) yang didokumentasikan.

Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini diharapkan dapat mempermudah dalam hal pengawasan kinerja antara pemimpin dan staf pegawai negeri sipil oleh pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka dirumuskan masalah adalah **“Apakah Ada Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Tata Kelola Pemerintah Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta “.**

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Adapun langkah yang digunakan adalah survey. Menurut Sugiyono (2012 : 29) metode penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana semestinya. Tetapi penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data misalnya memberikan kuesioner dan dokumentasi kepada Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

Hasil Data dan Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses pengawasan dalam organisasi yang berguna untuk melindungi kekayaan perusahaan yang diakibatkan pencurian, penggelapan keuangan oleh karyawan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya (Peraturan Pemerintah Indonesia No 60 Tahun 2008 tentang SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat diukur dengan beberapa indicator, antara lain (a) Penegakan integritas dan nilai etika., (b) Komitmen terhadap kompetensi., (c) Kepemimpinan yang kondusif., (d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan., (e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat., (f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM., (g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif., (h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Setelah kuesioner diberikan maka, jawaban diberikan kepada responden dan diberi nilai, kemudian dibuat table tabulasi data selanjutnya dihitung nilai intervalnya. Kemudian diketahui nilai tinggi dengan nilai terendah sudah ditentukan maka akan diketahui :

- Nilai tertinggi : 113
- Nilai terendah : 60
- Jumlah kategori yang ditentukan : 4

Maka nilai interval yang ditentukan yaitu :

$$i = \frac{113 - 60}{4}$$

$i = 13,25 \rightarrow$ dibulatkan menjadi 13

Setelah diperoleh nilai interval 13, maka dapat dijabarkan menjadi dasar dalam pembuatan kualifikasi nilai responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sistem pengendalian intern pemerintah (X) disusun menjadi 4 kategori. Empat tingkatan tersebut selanjutnya dapat dibuatkan table distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel III Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X)

Kategori	Interval	Jumlah	Persentase
Sangat Tinggi	102 - 115	7	50,00%
Tinggi	88 - 101	3	21,43%
Rendah	74 - 87	0	0,00%
Sangat Rendah	60 - 73	4	28,57%

Sumber : data primer diolah, 2020

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta termasuk kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang skor sistem pengendalian intern pemerintah yaitu 50% atau 7 responden.

2. Tata Kelola Pemerintahan

Good governance artinya pemerintahan yang baik yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati HAM, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal (Nurcholis, 2007:300). United Development Program

(UNDP,1997) mengemukakan bahwa ada beberapa indicator dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu (a) Partisipasi.,(b) Penegakan hukum., (c) Transparansi.,(d) Kesetaraan.,(e) Wawasan kedepan.,(f)Akuntabilitas.,(g)Pengawasan., (h) Efisiensi dan efektivitas.,(i) Profesionalisme.

Setelah kuesioner diberikan maka, jawaban diberikan kepada responden dan diberi nilai, kemudian dibuat table tabulasi data selanjutnya dihitung nilai intervalnya. Kemudian diketahui nilai tinggi dengan nilai terendah sudah ditentukan maka akan diketahui :

- a. Nilai tertinggi : 111
- b. Nilai terendah : 32
- c. Jumlah kategori yang ditentukan : 4

Maka nilai interval yang ditentukan yaitu :

$$i = \frac{111 - 32}{4}$$

$i = 19,75 \rightarrow$ dibulatkan menjadi 20

Setelah diperoleh nilai interval 20, maka dapat dijabarkan menjadi dasar dalam pembuatan kualifikasi nilai responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tata kelola pemerintah (Y) disusun menjadi 4 kategori. Empat tingkatan tersebut selanjutnya dapat dibuatkan table distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel V Distribusi Frekuensi Tata Kelola Pemerintah

kategori	Interval	Jumlah	Persentase
Sangat Tinggi	95 – 115	8	57,14%
Tinggi	74 – 94	3	21,43%
Rendah	53 – 73	2	14,29%
Sangat Rendah	32 – 52	1	7,14%

Sumber : data primer diolah, 2020

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah di Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta termasuk kategori sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang skor sistem pengendalian intern pemerintah yaitu 57,14% atau 8 responden.

Setelah diolah datanya maka selanjutnya adalah Uji instrument. Uji instrument adalah instrument yang telah diuji harus valid dan reliable, maka untuk itu instrument dalam penelitian yang berupa kuesioner harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk melihat hasilnya apakah valid atau tidak. Adapun hasil uji instrument dengan validitas dan reliabilitas, sebagai berikut :

1. Hasil Uji Validitas Instrumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X). Uji validitas merupakan cara untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuisisioner yang diberikan kepada responden. Sementara itu variable yang dapat dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} (0,532).

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa hasil pengujian korelasi *product moment pearson* untuk uji validitas data kuisisioner variabel sistem pengendalian intern pemerintah, setelah dilakukan pengolahan data dengan *SPSS versi 24* diketahui bahwa nilai korelasi hasil pengujian r hitung nilainya di atas lebih besar dari r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item dalam kuisisioner variabel sistem pengendalian intern pemerintah secara keseluruhan valid.

2. Hasil Uji Validitas Instrumen Tata Kelola Pemerintah (Y). Uji validitas kuesioner yang diberikan kepada 14 responden, untuk uji variable tata kelola pemerintah (Y) yang terdiri dari 30 pertanyaan.

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa hasil pengujian korelasi *pearson product moment* untuk uji validitas data kuisioner variabel tata kelola pemerintah, setelah dilakukan pengolahan data dengan *SPSS versi 24* diketahui bahwa nilai korelasi hasil pengujian (*r* hitung) nilainya di atas/ lebih besar dari *r* tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item dalam kuisioner variabel tata kelola pemerintah secara keseluruhan valid.

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menggunakan computer *SPSS veris 24* menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Tata Kelola Pemerintah sebanyak 30 item, dinyatakan valid dan dapat dilihat di table berikut :

Tabel VIII Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	(SPIP)	0,962	Reliabel
2	Tata Kelola Pemerintah	0,957	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2020

Dari tabel diatas hasil pengujian reliabilitas sebesar 0,962 lebih besar dari 0,6 (*Cronbach Alpha*), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuisioner tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri dari 30 item antar itemnya konsisten (reliabel). *Cronbach Alpha* tata kelola pemerintah sebesar 0,957 lebih besar dari 0,6 (*Cronbach Alpha*), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuisioner tata kelola pemerintah yang terdiri dari 30 item antar itemnya konsisten (reliabel).

Setelah melakukan uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabel, dan hasilnya adalah valid dan reliabel untuk diuji maka setelah itu pengujian menggunakan analisis Regresi Linear Sederhana, Uji *t*, Uji *F* dan Koersi Determinasi sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variable Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Tata Kelola Pemerintah dengan menggunakan *SPSS versi 24* sebagai berikut :

Tabel IX Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	19.454	21.914		.888	.392
	X	.754	.231	.686	3.263	.007

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer diolah 2020

Hasil pengujian seperti nampak pada tabel di atas diketahui koefisien variabel bebas *X* yaitu sistem pengendalian intern pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar 0,754 dengan *t* hitung sebesar 3,263 pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ didapatkan $\rho = 0,007$. Konstanta sebesar 19,454 yang menunjukkan nilai konstan apabila tidak ada pengaruh variabel bebas *X*.

Dengan demikian dapat ditentukan model estimasi regresinya sebagai berikut: $Y = 19,454 + 0,754X$. Ini menunjukkan model prediksi sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 19,454 adalah nilai konstan (tetap) bagi variabel tata kelola pemerintah (*Y*), apabila tidak ada

pengaruh dari variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X). Artinya apabila X ditingkatkan 1 satuan nilai Y adalah tetap atau sebesar 19,454 satuan.

- b. Koefisien regresi X sebesar 0,754 menunjukkan adanya pengaruh positif sistem pengendalian intern pemerintah (X) terhadap tata kelola pemerintah (Y). Artinya apabila sistem pengendalian intern pemerintah ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan tata kelola pemerintah sebesar 0,754 satuan.

2. Uji t

Untuk menguji variable Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap tata kelola pemerintah apakah berpengaruh dapat digunakan uji t dan adapun hasil perhitungan dengan program *SPSS versi 24* adalah sebagai berikut :

Tabel X Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.454	21.914		.888	.392
X	.754	.231	.686	3.263	.007

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer diolah 2020

Berdasarkan pengujian model regresi tampak bahwa nilai t hitung sebesar 3,263 pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ diketahui sig (ρ) sebesar 0,007 sehingga $0,007 < 0,05$ atau t sebesar 3,263 dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikan $\alpha 5\%$ diketahui sebesar 2,1788 dengan demikian karena t hitung $> t$ tabel sehingga menolak hipotesis nol. Dengan

demikian disimpulkan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintah.

3. Uji F

Uji F digunakan mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Tata Kelola Pemerintah. Adapun hasil Uji F dengan menggunakan program *SPSS versi 24* adalah sebagai berikut :

Tabel XI Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.730.825	1	2.730.825	10.644	.007 ^b
1 Residual	3.078.603	12	256.550		
Total	5.809.429	13			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Sumber : data primer diolah 2020

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana pada uji F tampak bahwa F hitung sebesar 10,644 dalam taraf signifikansi $\alpha 5\%$ didapatkan $\rho = 0,007$ atau F tabel sebesar 0,211. Karena F hitung $> F$ tabel atau $0,007 < 0,05$ dengan demikian menolak hipotesis nol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap variabel tata kelola pemerintah.

4. Koefisien Determinasi

Koefisiensi determinasi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variable bebas yang terdiri dari Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (X) terhadap Tata Kelola Pemerintah (Y) di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Adapun hasil analisis dari determinasi koefisien dengan menggunakan *SPSS versi 24* sebagai berikut :

Tabel XII Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.686 ^a	.470	.426	16.017

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer diolah 2020

Berdasarkan tabel koefisien determinasi hasil pengujian seperti tampak pada tabel di atas diketahui R-Square sebesar 0,470. Dengan demikian koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 47,0%, sedangkan sisanya sebesar 53% tata kelola pemerintah dipengaruhi faktor-faktor lain selain sistem pengendalian intern pemerintah.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis deskripsi terhadap sistem pengendalian intern pemerintah diketahui sebagian besar responden menilai sangat tinggi sebanyak 7 (50%), tinggi sebanyak 3 (22%), dan sangat rendah sebanyak 4 (28%).
2. Berdasarkan analisis deskripsi terhadap tata kelola pemerintah diketahui sebagian besar responden menilai sangat tinggi sebanyak 8 (57,14%), dan lainnya yaitu tinggi sebanyak 3 (21,43%), rendah sebanyak 2

(14,29%), sedangkan yang sangat rendah sebanyak 1 (7,14%).

3. Terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap tata kelola pemerintah. Terbukti pada hasil penelitian t hitung sebesar 3,263 ($p < 0,007$) signifikan pada taraf signifikansi $\alpha < 5\%$ ($p < 0,05$).

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsini, 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Bina Angkasa.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Nuraida, Ida. 2014. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta : PT Kanisius.
- Siagian P. Sondang. 2006. *Teori Organisasi*. Jakarta. Harvarindo.
- Deddy Mulyadi. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung : Alfabeta Bandung
- Munir Sukoco, Badri. 2006. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Surabaya : Erlangga.
- Sugiyono. 2010. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitass Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

- The Liang Gie. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty Offset.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2016. *Memahami Konsep Pengendalian Internal*. Jakarta : Harvarindo.
- Wing Wahyu Winarno. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Skripsi Rohmaningsih Sari Saputri (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penerapan Good Governance (studi kasus pada organisasi perangkat daerah kota Surakarta).